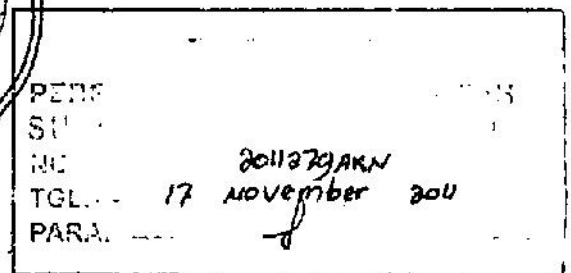
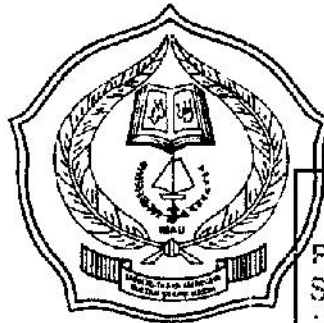
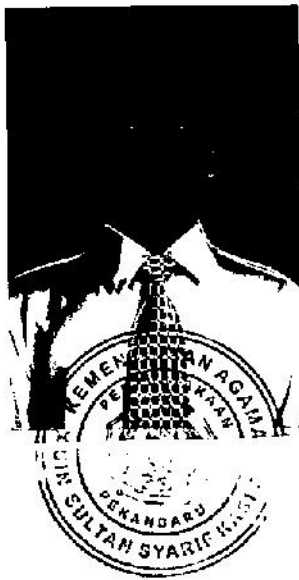


**ANALISIS AKUNTANSI PERSEDIAAN
PADA PT. MEGA DEPARTMENT STORE
PEKANBARU**

SKRIPSI



OLEH:

LINDUNG PUTRA
NIM. 10473026206

PROGRAM S1

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010**

**ANALISIS AKUNTANSI PERSEDIAAN
PADA PT. MEGA DEPARTMENT STORE
PEKANBARU**

SKRIPSI



OLEH

LINDUNG PUTRA
NIM : 10473026206

PROGRAM S1

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIA U
2010**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


NAMA : LINDUNG PUTRA
NIM : 10473026206
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : AKUNTANSI (S1)
JUDUL : ANALISIS AKUNTANSI PERSEDIAAN PADA PT. MEGA
DEPARTMENT STORE PEKANBARU

DI SETUJUI OLEH:

PEMBIMBING I



Rimet, SE, MM, Ak
NIK: 130 707 014

PEMBIMBING II


Alchudri, SE.Ak, MM, CPA
NIP: 19721125 200710 1 002

MENGETAHUI:


DEKAN
Drs. Azwar Harahap, M.Si
NIP: 19560202 1984031 1 002


KETUA JURUSAN
Nasrullah Djamil, SE, MM, Ak
NIP: 19780808 200710 1 003

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : LINDUNG PUTRA
NIM : 10473026206
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : AKUNTANSI (S1)
JUDUL : ANALISIS AKUNTANSI PERSEDIAAN PADA
PT. MEGA DEPARTMENT STORE
PEKANBARU
HARI/TANGGAL UJIAN : JUMAT, 28 JANUARI 2011

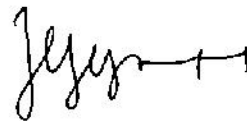
PANITIA UJIAN:

KETUA



Drs. H Kodri H. Nawawi, MA
NIP: 150 183 518

SEKRETARIS



Desrir Miftah, SE, MM, Ak
NIP: 19740412200604 2 002

ANGGOTA:

PENGUJI I



Dony Martias, SE, MM
NIP: 19760306200710 1 004

PENGUJI II



Hj. Elisanovi, SE, MM, Ak
NIK: 130 403 039

ABSTRAK

Analisis Akuntansi Persediaan pada PT. Mega Department Store Pekanbaru

Oleh:

Lindung Putra

Istilah persediaan secara umum digunakan untuk menunjukkan sejumlah barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual atau diproses sebagai bahan baku untuk memproduksi suatu barang yang akan dijual. Persediaan juga merupakan asset strategis bagi suatu perusahaan karena nilai persediaan akan dicantumkan dalam laporan neraca dan laporan rugi laba perusahaan. Mengingat posisi strategis dan besarnya dana yang tertanam pada asset persediaan maka sewajarnya perusahaan memberikan perhatian khusus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan persediaan tersebut.

Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan akuntansi persediaan yaitu penentuan harga perolehan persediaan, sistem pencatatan, metode penilaian, dan penyajian persediaan dalam laporan keuangan. Kesalahan dalam perlakuan hal penting tersebut akan menyebabkan nilai persediaan tersajikan tidak benar. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi nilai harga pokok penjualan pada laporan laba rugi dan total aset pada neraca, tidak hanya pada periode tersebut tetapi juga akan mempengaruhi laporan keuangan pada periode berikutnya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang perlakuan persediaan barang dagang pada PT. Mega Department Store, penulis berkesimpulan bahwa perlakuan akuntansi persediaan pada perusahaan tersebut tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dengan demikian, adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk perusahaan dan tambahan pengetahuan bagi penulis.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT, dengan selesainya penulisan skripsi ini maka semakin tidak teringgalah nikmat yang diberikan-Nya. Skripsi dengan judul “Analisis Akuntansi Persediaan pada PT. Mega Department Store Pekanbaru” ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian Oral Comprehensive guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Terimakasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah tulus memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis selama proses belajar dan penyelesaian tulisan ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. M. Nazir, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Bapak Drs. Azwar Harahap, M.Si, Dekan Fakultas ekonomi dan ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Nasrullah Djamil, SE. M.Si. Ak. Ketua Jurusan Akuntasai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Ibu Rimet, SE. MM. Ak dan Bapak Alchudry, SE. Ak. MM. CPA. Pembimbing I dan Pembimbing II dalam proses penyelesaian penulisan ini
5. Ibu Elisa Novi, SE. MM. Ak, Penasehat Akademis penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis
7. Ayahanda (Mursyid) dan Ibunda (Ramini alm.) tercinta, Kakak Penulis (Marina, Ahamad Yusuf, Royani) dan Adik Penulis (Enggal Mulyani, Sri Wahyuni, Amin Rais)
8. Serta seluruh sahabat dan pihak yang membantu yang tak disebutkan nama-namanya

Semoga semua bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dapat menjadi penambah berat timbangan kebaikan kalian di akhirat kelak. Penulis juga berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Segala puji hanya milik Allah SWT Pembina semesta alam.

Pekanbaru, Januari 2011

Penulis

Lindung Putra

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Metode Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	
A. Pengertian persediaan	12
B. Penggolongan Persediaan	14
C. Fungsi Persediaan	15
D. Akuntansi Persediaan	17
E. Akuntansi dalam Perspektif Islam	39
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah Singkat Perusahaan	44
B. Struktur Organisasi Perusahaan	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaruh Biaya Angkut Pembelian Barang Dagang terhadap Harga Pokok Persediaan Barang Dagang	50
B. Pengaruh Pencatatan Potongan Pembelian terhadap Harga Pokok Persediaan Barang Dagang	53
C. Pengaruh Pencatatan Persediaan Barang Konsinyasi terhadap Harga Pokok Persediaan Barang Dagang	55
D. Penyajian Persediaan pada Laporan Keuangan	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel:		Halaman
I.1	Tabel Perbandingan Persentase Aktiva Persediaan dengan Total Aktiva Lancar.....	3
II.1	Tabel Penilaian Persediaan Metode FIFO	29
II.2	Tabel Penilaian Persediaan Metode LIFO	30
II.3	Tabel Metode Harga Pokok Rata-rata	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar:	Halaman
III.1 Gambar Struktur Organisasi PT. Mega Department Store	45



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persediaan merupakan harta yang sangat penting bagi perusahaan, baik perusahaan dagang maupun perusahaan industri. Jenis persediaan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan berbeda tergantung dari jenis dan sifat perusahaan itu. Untuk perusahaan dagang, dana umumnya banyak tertanam dalam bentuk persediaan barang dagang sedangkan bagi perusahaan industri tertanam dalam bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi.

Perlakuan akuntansi terhadap persediaan yang baik dan benar mutlak diperlukan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena pos persediaan bagi perusahaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penyajian laporan keuangan. Persediaan secara langsung mempengaruhi nilai aktiva di dalam neraca, demikian pula halnya dalam penentuan harga pokok penjualan dalam perhitungan laba rugi. Kesalahan terhadap perlakuan akuntansi persediaan akan menimbulkan penyajian informasi yang salah pada laporan keuangan yang dihasilkan.

Di dalam Neraca (*balance sheet*), persediaan barang dagangan dicantumkan sebagai aset, letaknya sesudah pos *account receivable* dan *notes receivable*. Di dalam rugi/laba (*profit and loss statement*) persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir akan diperoleh jumlah barang yang dijual.

Dalam perhitungan laba rugi, persediaan mempunyai pengaruh yang besar dalam perhitungan harga pokok penjualan dan laba bersih. Harga pokok penjualan dihitung dari nilai persediaan awal periode ditambah dengan pembelian

dan biaya yang terjadi dikurang persediaan akhir periode. Persediaan awal dan persediaan akhir ini dicantumkan dalam laporan laba dan rugi, dimana persediaan akhir dari suatu periode akan menjadi persediaan awal pada periode berikutnya.

Berkaitan dengan hal di atas, jika terjadi kesalahan dalam perhitungan persediaan, maka akan mengakibatkan kekeliruan penyajian saldo persediaan akhir, aktiva lancar, dan total aktiva pada neraca. Selain itu, kesalahan dalam perhitungan nilai persediaan akan menimbulkan kekeliruan penyajian harga pokok penjualan, laba kotor, dan laba bersih pada laporan laba rugi. Selanjutnya, karena laba bersih ditambahkan ke modal pada akhir periode, maka ekuitas pemilik juga akan salah saji.

Sebagai salah satu dari unsur harta lancar terbesar yang dimiliki oleh perusahaan, persediaan sangat rentan keselamatannya dari segala bentuk kesalahan dan penyelewengan yang mungkin terjadi. Ini terjadi bila sistem pengawasan persediaan yang diterapkan kurang memadai atau kesalahan pencatatan akibat kurangnya pengetahuan pihak manajemen dan akuntannya.

PT. Mega Dept. Store merupakan salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang perdagangan di Pekanbaru, tepatnya di Mal Pekanbaru. PT. Mega Dept. Store menjual berbagai jenis pakaian pria dan wanita baik dewasa maupun anak-anak. Perusahaan ini juga menjual berbagai jenis kosmetik dan perlengkapan (aksesoris) termasuk sepatu dan lain sebagainya.

Adapun besar persediaan pada Perusahaan dapat dilihat pada tabel yang diadopsi dari neraca (sebahagian) tahun 2007 berikut:

Tabel I.1
Perbandingan Persentase Aktiva Persediaan dengan Total Aktiva Lancar

AKTIVA LANCAR	TOTAL	PERSENTASE
Kas	560.287.850,00	3,85 %
Bank	5.078.412.790,26	34,92 %
Piutang Dagang	819.303.240,00	5,63 %
Piutang Lain-lain	2.368.872.050,00	16,29 %
Persediaan	5.417.700.650,00	37,25 %
Biaya Dibayar Dimuka	149.299.900,00	1,03 %
Perlengkapan Toko	151.023.850,00	1,04 %
Jumlah Aktiva Lancar	14.544.900.330,26	100,00 %

Sumber: Laporan Keuangan (Neraca Sebahagian) PT. Mega Dept. Store tahun 2007

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total aktiva persediaan lebih dari sepertiga bahagian dari total keseluruhan aktiva lancar, yaitu 37,25%. Sebuah angka yang cukup besar jika dibandingkan dengan total aktiva yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa persediaan mempunyai posisi strategis dan penting bagi operasi perusahaan.

Perusahaan menggunakan pencatatan *accrual basic*, adapun dalam pencatatan persediaan perusahaan mencatat menurut sistem persediaan periodik. Sedangkan pembebanan pengeluaran persediaan barang yang dijual keharga penjualan dilakukan berdasarkan asumsi harga pokok rata-rata berjalan.

Ada beberapa hal yang menjadi karakteristik dari akuntansi dengan sistem periodik yaitu bahwa setiap pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual atau diproduksi harus di debet ke akun pembelian. Total akun pembelian bersih pada akhir periode ditambah dengan total biaya perolehan persediaan dan total persediaan pada awal periode akan menghasilkan total persediaan yang tersedia untuk dijual pada tahun tersebut. Sedangkan harga pokok penjualan

diperoleh dengan melakukan pengurangan total barang yang tersedia untuk dijual dengan persediaan akhir.

Adapun penjurnalan saat transaksi pembelian terjadi, perusahaan membuat jurnal seperti berikut:

<i>Pembelian</i>	<i>Rp. XXX XXX</i>
<i>Hutang dagang/Kas</i>	<i>Rp. XXX XXX</i>

Saat transaksi penjualan terjadi maka perusahaan membuat jurnal seperti berikut:

<i>Kas/Piutang usaha</i>	<i>Rp. XXX XXX</i>
<i>Penjualan</i>	<i>Rp. XXX XXX</i>

Sedangkan penentuan harga persediaan yang ada pada akhir periode akuntansi dibebankan menurut asumsi harga pokok rata-rata berjalan. Dalam prakteknya, PT. Mega Dept. Store lebih dominan menerapkan sistem identifikasi khusus daripada menerapkan metode rata-rata bergerak, karena perusahaan telah menerapkan sistem persediaan yang terkomputerisasi. Dimana rincian yang relevan untuk setiap jenis persediaan seperti kuantitas dan harga disimpan dalam catatan persediaan. Pada saat terjadi penjualan ketika bagian penjualan men-*scan* kode bar dari barang yang dijual dengan *scanner* optic, secara otomatis *scanner* tersebut akan membaca kode magnetik dan memasukkannya dalam register kas, dengan demikian file catatan khusus persediaan dimutakhirkan.

Dalam memperlakukan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan persediaan, seperti biaya transportasi termasuk di dalamnya biaya bongkar-muat, telah terjadi kesalahan dalam perlakuan pencatatannya. Oleh perusahaan biaya ini tidak dimasukkan sebagai penambah harga perolehan persediaan.

Selama periode tahun 2007 pada pernyataan laba rugi dapat dilihat adanya Biaya Transportasi sebesar Rp.50.763.650 sebagai biaya operasional perusahaan. Bagi perusahaan pembebanan langsung Biaya Transportasi pada pembelian barang dagang akan menyebabkan perusahaan sulit untuk menentukan harga jual barang dagangannya, karena harga jual barang dagangan sewaktu-waktu akan dirubah sebagai bentuk strategi penguasaan pasar. Padahal dalam PSAK No.14.2 telah dinyatakan bahwa biaya persediaan harus meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai.

Pada paragraf selanjutnya (paragraf 07) dalam PSAK No.14 dijelaskan lebih lanjut bahwa biaya pembelian meliputi harga pembelian, bea masuk, dan pajak lainnya (kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh perusahaan kepada kantor pajak), biaya pengangkutan, penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Dengan demikian seharusnya perusahaan menjadikan biaya-biaya tersebut sebagai faktor penambah harga perolehan persediaan.

Adapun jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

<i>Pembelian</i>	<i>Rp. XXX XXX</i>
<i>Kas</i>	<i>Rp. XXX XXX</i>
<i>Pembayaran ongkos angkut pembelian</i>	

Dengan tidak dimasukkannya biaya transportasi pembelian barang dagang sebagai penambah biaya perolehan persediaan, maka perusahaan telah menetapkan harga pokok penjualan lebih rendah dari yang seharusnya. Dengan demikian, berdasarkan pernyataan SAK No. 14 tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa perlakuan perusahaan PT. Mega Dept. Store atas biaya angkut

pembelian barang persediaan telah salah karena tidak sesuai dengan PSAK No. 14.

Permasalahan lain yang ditemui adalah perlakuan terhadap potongan pembelian atas pembelian dalam partai besar. Potongan ini dicatat sebagai pendapatan lain-lain oleh perusahaan. Padahal seharusnya potongan pembelian (sama halnya dengan retur pembelian) merupakan bagian dari pengurang harga perolehan persediaan. PT. Mega Dept. Store mencatat pembelian dan hutang usaha dengan *metode bersih*, hal ini tidak ada masalah ketika transaksi pembelian dilakukan secara tunai karena perusahaan mencatat nilai pembelian setelah dikurangi potongan pembelian (*purchase discount*). Akan tetapi ketika potongan diperoleh saat pembayaran hutang, perusahaan mencatat potongan tersebut sebagai pendapatan. Hal ini dapat dilihat dalam proses pembayaran hutang dagang pada PT. Tritunggal Bangun SJH. PT. Tritunggal telah menyatakan bahwa pembayaran hutang dibawah 10 hari setelah tanggal transaksi akan memperoleh potongan 10%, karena pada tanggal 5 Agustus 2007 perusahaan telah mencatat pembelian tidak tunai senilai Rp. 5.318.000,00 (tidak ada potongan) maka pada saat pelunasannya PT. Mega Dept. Store mengasumsikan bahwa potongan yang diperolehnya pada saat pelunasan hutang merupakan pendapatan lain-lain, yaitu pendapatan atas diskon. Atas kedua transaksi tersebut jurnal yang dibuat oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 5 Agustus 2007, saat pembelian dilakukan.

<i>Pembelian</i>	<i>Rp. 5.318.000</i>
<i>Hutang dagang</i>	<i>Rp. 5.318.000</i>

Pada tanggal 8 Agustus 2007, saat pelunasan hutang atas transaksi tanggal 5 Agustus.

<i>Hutang dagang</i>	<i>Rp. 5.318.000</i>
<i>Kas</i>	<i>Rp. 4.786.200</i>
<i>Pendapatan atas Diskon</i>	<i>Rp. 531.800</i>

Dengan demikian, karena potongan pembelian tidak diperlakukan sebagai pengurang biaya perolehan persediaan, maka harga pokok penjualan yang telah ditetapkan PT. Mega Dept. Store menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Hal ini menunjukkan laporan keuangan yang dibuat perusahaan tidak sesuai dengan PSAK NO.14.

Kesalahan lain yang dilakukan oleh Perusahaan adalah dengan memperlakukan barang konsinyasi dalam laporan keuangan sebagai persediaan barang dagangannya. Hal ini dapat dilihat pada laporan persediaan akhir barang persediaan.

Persediaan akhir yang dicatat terlalu tinggi akan menyebabkan harga pokok penjualan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya, maka pendapatan dan laba perusahaan akan tersajikan lebih tinggi dari yang seharusnya. Dengan demikian laporan keuangan yang dibuat perusahaan tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari perusahaan tersebut. Itu semua adalah sebagai akibat dari perlakuan yang sama (digabungnya) antara barang konsinyasi dengan barang persediaan milik perusahaan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlakuan akuntansi persediaan pada PT. Mega Dept. Store tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

“Apakah penerapan akuntansi persediaan PT. Mega Department Store Pekanbaru telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan aset persediaan yang ditetapkan pada PT. Mega Department Store dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang penerapan akuntansi persediaan khususnya pada PT. Mega Dep. Store Pekanbaru
- b. Bagi perusahaan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dalam menentukan kebijaksanaan yang berkaitan dengan penerapan akuntansi persediaan
- c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam melakukan penelitian yang sama..

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan fakta yang memadai guna mendukung penelitian ini, maka penelitian dilakukan di lokasi operasi PT. Mega Dep. Store Pekanbaru, di Mal Pekanbaru.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder, berupa data mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, aktifitas perusahaan dan laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari bagian administrasi dan bagian keuangan perusahaan.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang berwenang dan berkaitan dengan masalah persediaan.
- b. Daftar pertanyaan, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan yang berkenaan dengan akuntansi persediaan maupun tentang sejarah perusahaan dan diserahkan kepada bagian yang berkaitan dan berwenang atas masalah yang ditanyakan.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian dievaluasi untuk dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan melakukan penelaahan berdasarkan kenyataan yang kemudian dibandingkan dengan teori yang ada guna mengambil kesimpulan sebagai pemecahan dari permasalahan yang

berkenaan dengan akuntansi persediaan pada PT. Mega Dep. Store Pekanbaru.

E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Bab ini berisikan uraian teoritis yang digunakan sebagai pendukung penulisan ini yaitu berisi tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan pengertian persediaan, jenis-jenis persediaan, fungsi persediaan, penentuan harga pokok (perolehan) persediaan, metode penilaian persediaan, dan penyajian persediaan dalam laporan keuangan serta pengendalian intern terhadap persediaan.
- BAB III : Merupakan uraian mengenai gambaran umum perusahaan yang berisi tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan serta aktivitas perusahaan.
- BAB IV : Pada bab ini penulis akan menguraikan analisis dan evaluasi terhadap masalah yang dijumpai dalam perhitungan harga pokok persediaan, sistem pencatatan persediaan, dan penyajian persediaan pada laporan keuangan.

BAB V : Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang penulis sampaikan sebagai hasil penelitian yang dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian persediaan

Istilah persediaan secara umum digunakan untuk menunjukkan sejumlah barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual. Untuk lebih memperoleh pemahaman mengenai pengertian persediaan, berikut ini akan dikemukakan pendapat beberapa ahli:

Persediaan adalah nama yang diberikan untuk barang-barang baik yang dibuat atau dibeli untuk dijual kembali dalam bisnis normal (Skousen, 2001: 360). Sedangkan E. Kieso (2002: 444) mengemukakan bahwa persediaan (*Inventory*) adalah pos-pos aktiva yang dimiliki untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam memproduksi barang yang akan dijual.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi barang yang dimiliki perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha normal perusahaan, atau persediaan bahan baku yang menunggu untuk diproses dalam menghasilkan barang yang akan dijual.

Pengertian persediaan yang dikemukakan oleh Smith dan Skousen (1999 : 326) yaitu istilah persediaan menunjukkan barang-barang yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan, serta untuk perusahaan manufaktur, barang-barang yang sedang diproduksi atau yang akan dimasukkan ke dalam proses produksi.

Selanjutnya Niswonger, et al (1999 :388) juga memberikan pengertian tentang persediaan sebagai berikut:

- a. Barang dagang yang disimpan untuk dijual dalam operasi normal perusahaan.
- b. Bahan yang terdapat dalam proses produksi atau disimpan dengan tujuan itu.

Sedangkan Ikatan Akuntansi Indonesia (2007: 14.1) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14 menjelaskan bahwa persediaan adalah aset:

- a. tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;
- b. dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau
- c. dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Menurut Baridwan (2004: 149) istilah persediaan barang dipakai untuk menunjukkan barang-barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual.

Sedangkan menurut Indrajit dan Djukopranoto (2003: 4), barang persediaan adalah sejumlah material yang disimpan dan dirawat menurut aturan tertentu dalam tempat persediaan agar selalu dalam keadaan siap pakai dan ditatausahakan dalam buku perusahaan.

Dari definisi-defenisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi persediaan tergantung pada kegiatan operasional perusahaannya. Pada perusahaan dagang hanya terdapat persediaan barang dagangan yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali sedangkan perusahaan industri –yang melakukan proses

pengolahan-- memiliki beberapa jenis persediaan berupa persediaan bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, dan barang jadi.

B. Penggolongan Persediaan

Penggolongan atas persediaan tergantung pada operasi bisnis. Bagi perusahaan dagang, barang yang dibelinya untuk dijual kembali merupakan persediaannya. Bagi perusahaan manufaktur, barang yang dibeli untuk diolah atau untuk mendukung proses pengolahan atau yang telah diolah tapi belum terjual merupakan persediaan.

Persediaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Dyckman, 2000: 377):

1. Persediaan Barang Dagang (Merchandise Inventory).

Yaitu barang yang ada di gudang (*goods on hand*) dibeli oleh pengecer atau perusahaan perdagangan seperti eksportir dan importir untuk dijual kembali. Umumnya, barang yang dibeli tersebut secara fisik tidak diubah oleh perusahaan pembeli, barang-barang tersebut tetap dalam bentuk yang telah jadi ketika meninggalkan tempat pembeliannya.

2. Persediaan Manufaktur (*Manufacturing Inventory*)

Dalam perusahaan manufaktur, persediaannya terdiri dari:

a. Persediaan Bahan Baku

Yaitu barang berwujud yang dibeli atau diperoleh dengan cara lain (misalnya ditambang) dan disimpan untuk penggunaan langsung dalam membuat barang untuk dijual kembali.

b. Persediaan Barang dalam Proses

Yaitu barang-barang yang telah melalui proses produksi namun masih membutuhkan proses lebih lanjut sebelum penyelesaian dan penjualan.

c. Persediaan Barang Jadi

Yaitu barang-barang yang telah selesai diproses tapi masih berada digudang dan disimpan untuk dijual.

d. Persediaan Perlengkapan Manufaktur

Yaitu barang-barang yang mendukung proses produksi yang merupakan bagian yang kurang penting bagi produk jadi. Misalnya pelumas mesin dan perlengkapan pembersih mesin.

3. Persediaan Rupa-rupa

Yaitu barang-barang seperti perlengkapan kantor, kebersihan, dan pengiriman. Persediaan jenis ini biasanya digunakan segera dan biasanya dicatat sebagai beban penjualan atau umum (*selling or general expenses*) ketika dibeli.

Sedangkan Ikatan Akuntansi Indonesia (2007: 14.1) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14 menjelaskan bahwa persediaan adalah aset:

- a. tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;
- b. dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau
- c. dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

C. Fungsi Persediaan

Persediaan dibentuk oleh perusahaan untuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan diproses atau dijual dalam kegiatan perusahaan. Maka dari itu, persediaan dalam perusahaan merupakan unsur yang paling lancar sebab tanpa ada persediaan, perusahaan tidak akan dapat memproduksi atau tidak dapat melaksanakan penjualan dalam melayani konsumen.

Persediaan merupakan aktiva yang penting untuk kebanyakan bisnis yang biasanya berupa aktiva lancar terbesar dari perusahaan manufaktur dan pengecer (*retail*) (Dyckman, 2000: 376).

Dari pendapat yang diberikan tersebut dapat diketahui bahwa persediaan merupakan bagian aktiva yang relatif aktif perubahannya sehingga kegagalan untuk melaporkan posisi persediaan secara tepat akan mengakibatkan adanya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan tersebut.

Di dalam Neraca (*balance sheet*), persediaan barang dagangan dicantumkan sebagai aset, letaknya sesudah pos *account receivable* dan *notes receivable*. Di dalam rugi/laba (*profit and loss statement*) persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir akan diperoleh jumlah barang yang dijual (Sadeli, 2002: 97).

Dalam perhitungan laba rugi, persediaan mempunyai pengaruh yang besar dalam perhitungan harga pokok penjualan dan laba bersih. Harga pokok penjualan dihitung dari nilai persediaan awal periode ditambah dengan pembelian dan biaya yang terjadi dikurang persediaan akhir periode. Persediaan awal dan persediaan akhir ini dicantumkan dalam laporan laba dan rugi, dimana persediaan akhir dari suatu periode akan menjadi persediaan awal pada periode berikutnya.

Berkaitan dengan hal di atas Warren menjelaskan jika terjadi kesalahan dalam perhitungan fisik persediaan, maka akan mengakibatkan kekeliruan penyajian saldo persediaan akhir, aktiva lancar, dan total aktiva pada neraca. Selain itu, kesalahan dalam perhitungan fisik persediaan akan menimbulkan kekeliruan penyajian harga pokok penjualan, laba kotor, dan laba bersih pada

laporan laba rugi. Selanjutnya, karena laba bersih ditambahkan kemodal pemilik pada akhir periode, maka ekuitas pemilik juga akan salah.

D. Akuntansi Persediaan

Permasalahan dasar dari akuntansi persediaan adalah biaya, yang mana biaya ini memiliki dua variabel yaitu permasalahan total unit barang persediaan dan biaya yang dibebankan terhadap unit persediaan tersebut, sebagaimana yang dikatakan Whittington dan Delaney (2000: 162) berikut ini:

The primary basic of accounting for inventories is cost, which includes the cash or other fair value of consideration given in exchange for it. Inventory cost is a function of two variables

- *The number of units included in inventory, and*
- *The costs attached to those units*

Beberapa hal penting yang akan dibahas sehubungan dengan akuntansi persediaan yaitu mengenai:

1. Penentuan Harga Pokok Persediaan

Harga pokok persediaan adalah seluruh pengorban atau pengeluaran yang dilakukan untuk mendapatkan persediaan yang siap untuk dijual atau diproses lebih lanjut.

Terdapat beberapa definisi harga pokok yang telah dikemukakan beberapa ahli, antara lain sebagai berikut:

Menurut Baridwan (2004:156), harga pokok adalah jumlah semua pengeluaran-pengeluaran langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan perolehan, penyajian, dan penempatan persediaan tersebut agar dapat dijual.

Kieso (2002: 449) mengemukakan bahwa harga pokok penjualan (*cost of goods sold*) adalah perbedaan antara biaya barang yang tersedia untuk dijual selama periode berjalan dengan biaya barang ada di tangan pada akhir periode.

Skousen (2001: 360) mengemukakan bahwa ketika produk dijual, produk tersebut bukan lagi aset. Biaya untuk membeli atau membuat produk harus dipindahkan dari klasifikasi aset (persediaan) pada neraca dan dilaporkan pada laporan laba rugi sebagai biaya-harga pokok barang yang dijual.

Pada Standar Akuntansi Indonesia (PSAK No. 14.2 tahun 2007) menyatakan bahwa biaya persediaan harus meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai (*present location and condition*).

Dalam GAAP 2004 yang diterbitkan Wiley dijelaskan bahwa *cost of goods sold is the cost of the inventory items sold during the period. In the case of a merchandising firm, net purchases (purchases less discount, returns, and allowances plus freight-in) are added to beginning inventory to get cost of goods available for sale.*

Sehubungan dengan harga pokok, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu unsur-unsur yang menjadi komponen harga pokok dan pengurang harga pokok. Unsur penambah harga pokok, seperti yang dikemukakan oleh Niswonger, et al (1999: 393) bahwa harga pokok persediaan barang dagang terdiri dari harga beli ditambah dengan semua pengeluaran yang terjadi sehubungan dengan pembelian barang tersebut, termasuk biaya transportasi, bea masuk, dan asuransi kerugian selama perjalanan.

Biaya angkut pada pembelian persediaan (*freight in*), potongan pembelian dan barang yang dikembalikan karena cacat atau tidak sesuai dengan pesanan merupakan unsur-unsur yang harus disesuaikan sebagai penambah atau pengurang harga pokok persediaan.

Potongan pembelian merupakan potongan dari daftar harga yang berlaku menjadi harga yang benar-benar dibebankan kepada para pelanggan. Adapun potongan pembelian ini dapat dicatat dengan dua cara, yaitu dengan metode *gross/kotor* dan metode *netto/bersih*.

Misalnya perusahaan membeli barang untuk bersediaan pada tanggal 1 Januari dengan harga faktur sebesar Rp. 500.000,00. dengan syarat pembayaran 2/10, n/30. Pembayaran utang tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Januari sehingga perusahaan mendapat potongan sebesar 2%. Jurnal yang dibuat untuk transaksi tersebut adalah (Baridwan, 2004: 157):

1) Metode harga *Gross/Bruto/Kotor*

Saat pembelian (1 Januari)

<i>Pembelian (Persediaan barang)</i>	<i>Rp. 500.000,00</i>
<i>Utang</i>	<i>Rp. 500.000,00</i>

Saat pembayaran utang (10 Januari)

<i>Utang</i>	<i>Rp. 500.000,00</i>
<i>Kas</i>	<i>Rp. 490.000,00</i>
<i>Potongan pembelian</i>	<i>Rp. 10.000,00</i>

Jika pembayaran dilakukan diatas tanggal 10 Januari

<i>Utang</i>	<i>Rp. 500.000,00</i>
<i>Kas</i>	<i>Rp. 500.000,00</i>

2) Metode Harga Bersih/Neto

Saat pembelian (1 Januari) dikenal ada dua cara:

Cara I

<i>Pembelian</i>	<i>Rp. 490.000,00</i>
<i>Utang</i>	<i>Rp. 490.000,00</i>

Cara II

<i>Pembelian</i>	<i>Rp. 490.000,00</i>
<i>Cadangan potongan pembelian</i>	<i>Rp. 10.000,00</i>
<i>Utang</i>	<i>Rp. 500.000,00</i>

Saat pembayaran utang (10 Desember)

Cara I

<i>Utang</i>	<i>Rp. 490.000,00</i>
<i>Kas</i>	<i>Rp. 490.000,00</i>

Cara II

<i>Utang</i>	<i>Rp. 500.000,00</i>
<i>Kas</i>	<i>Rp. 490.000,00</i>
<i>Cadangan potongan pembelian</i>	<i>Rp. 10.000,00</i>

Jika pembayaran dilakukan diatas tanggal 10 Januari

Cara I

<i>Utang</i>	<i>Rp. 490.000,00</i>
<i>Potongan pembelian yang hilang</i>	<i>Rp. 10.000,00</i>
<i>Kas</i>	<i>Rp. 500.000,00</i>

Cara II

<i>Utang</i>	<i>Rp. 500.000,00</i>
<i>Kas</i>	<i>Rp. 500.000,00</i>
<i>Potongan pembelian yang hilang</i>	<i>Rp. 10.000,00</i>
<i>Cadangan potongan pembelian</i>	<i>Rp. 10.000,00</i>

Dalam pencatatan dengan metode bersih, persediaan dicatat sebesar nilai bersihnya (setelah dikurangi diskon pembelian). Ketidakmampuan mengambil potongan pembelian dalam periode diskon, sebenarnya merupakan pengeluaran. Jumlah tersebut harus dicatat dalam perkiraan potongan pembelian yang tidak diambil dan dilaporkan dalam satu pos terpisah pada perhitungan laba rugi. Potongan yang hilang biasanya tarif bunga yang relatif tinggi yang menunjukkan suatu kegagalan manajemen keuangan sebagai akibat kecerobohan dalam perhitungan alternatif pembayaran atau ketidakmampuan menghindari biaya ekstra.

Dalam metode kotor, potongan pembelian tunai yang diambil akan disajikan sebagai suatu perkiraan kontra pembelian, yaitu potongan pembelian (jika menggunakan sistem periodik), atau jika menggunakan sistem perpetual, potongan pembelian dikredit langsung ke perkiraan persediaan.

Selain dari potongan pembelian yang menjadi unsur pengurang harga pokok, penyesuaian lain yang perlu dilakukan atas harga faktur terhadap barang/ bahan yang rusak atau kualitasnya dibawah standar yang ditetapkan. Kerusakan atau penyusutan bahan masih merupakan keadaan yang normal terjadi, dimana terhadap hal ini dilakukan retur pembelian. Dalam sistem perpetual penyesuaian dilakukan dengan mengkredit langsung ke perkiraan persediaan. Sedangkan pada

sistem periodik penyesuaian dicatat sebagai suatu perkiraan kontra pembelian. Penyesuaian terhadap hal-hal abnormal yang terjadi seperti pencurian, kerusakan gedung atau sebab-sebab lainnya dilaporkan secara terpisah sebagai biaya lain-lain. Sebagai gambaran, misal hasil perhitungan fisik persediaan terdapat kekurangan sebesar Rp. 2.700.000,00– maka ayat jurnal penyesuaian untuk kasus ini dibuat sebagai berikut (Kieso, 2002: 448):

Keterangan	Debet	Kredit
<i>Penyesuaian terhadap persediaan</i>	2.700.000,00	—
<i>Persediaan</i>	—	2.700.000,00

2. Sistem Pencatatan Persediaan

Sistem pencatatan persediaan sangat penting artinya dalam menentukan jumlah dan nilai persediaan pada akhir periode yang akan digunakan dalam menyusun perhitungan laporan laba rugi dan neraca. Hal ini sangat erat hubungannya dalam menentukan fisik persediaan akhir tahun dalam menyusun laporan keuangan.

Dalam Sistem Akuntansi, Mulyadi (2001: 556) menyatakan bahwa ada dua macam metode pencatatan persediaan: metode mutasi persediaan (*perpetual inventory method*) dan metode persediaan fisik (*physical inventory method*).

Dari sejumlah literatur yang ada, pembagian metode pencatatan persediaan ini secara umum adalah sama. Untuk lebih jelas tentang metode tersebut, berikut ini dua sistem pencatatan persediaan yang biasa digunakan oleh perusahaan menurut pengertian Simamora (2000 :271):

Pertama, sistem periodik, dimana persediaan barang dagangan ditentukan dengan menghitung, menimbang, atau mengukur unsur-unsur

persediaan yang ada di gudang. Sistem periodik menyesuaikan saldo persediaan hanya pada akhir periode akuntansi. Rekening persediaan tidak terpengaruh oleh pembelian maupun penjualan selama periode berjalan. Sistem periodik disebut juga dengan sistem persediaan fisik.

Kedua, Sistem perpetual, dimana persediaan barang dagangan ditentukan dengan membuat catatan yang berkelanjutan perihal kenaikan, penurunan, dan saldo persediaan barang dagangan. Setiap kali barang dagangan dibeli, rekening persediaan meningkat; setiap kali barang dagangan dijual, rekening persediaan menurun. Sistem persediaan perpetual disebut juga dengan sistem persediaan buku (*book inventory system*).

Dari pendapat tersebut dapat kita ketahui bahwa pencatatan persediaan dengan menggunakan sistem perpetual berdasarkan pada kedetilan dari pencatatan persediaan, setiap saat kita mengetahui besarnya persediaan akhir yang kita miliki. Sedangkan dalam sistem periodik hanya mengandalkan perhitungan fisik pada akhir periode akuntansi.

a. Sistem Periodikal/ Periodik

Periodik adalah cara penentuan unit persediaan dengan menghitung secara fisik pada suatu titik waktu yang ditentukan (Nainggolan, 2006: 60).

Dalam metode periodik, perkiraan persediaan tidak akan terpengaruh oleh kegiatan penjualan dan pembelian yang terjadi. Padahal jika kegiatan penjualan terjadi, seharusnya nilai persediaan berkurang dan hak pemilikan persediaan telah berpindah kepada pembeli. Demikian juga apabila dilakukan pembelian, maka nilai persediaan juga bertambah karena terjadi penambahan secara fisik. Hal tersebut terjadi karena mutasi terhadap perkiraan persediaan

dilakukan secara periodik, yaitu sekali pada saat penyesuaian dilakukan (Soepardi, 2006: 76).

Dalam sistem ini seluruh perubahan yang terjadi dalam persediaan tidak secara langsung dicatat pada perkiraan persediaan. Apabila terjadi pembelian persediaan maka transaksi pembelian ini dicatat pada rekening pembelian. Karena tidak dilakukan pencatatan langsung maka harus dilakukan inventory taking, yaitu suatu perhitungan, penukuran, atau penimbangan barang pada akhir periode akuntansi untuk menetapkan kualitas yang ada dalam perusahaan. Perhitungan persediaan ini diperlukan untuk mengetahui berapa jumlah barang yang masih ada dan kemudian diperhitungkan harga pokoknya.

Karena tidak ada catatan mutasi persediaan barang, maka harga pokok penjualan juga tidak dapat diketahui sewaktu-waktu. Harga pokok baru diketahui apabila persediaan sudah dihitung.

Ada masalah yang timbul jika digunakan metode ini yaitu jika diinginkan menyusun laporan keuangan jangka pendek –misalnya bulanan– maka perusahaan akan melakukan perhitungan fisik setiap bulannya, tentu saja ini akan memakan waktu yang cukup lama jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar yang memiliki persediaan dalam jumlah yang besar.

b. Sistem Perpetual

Perpetual adalah cara penentuan unit persediaan dengan memelihara catatan administratif mengenai berapa unit atau kuantitas yang dibeli dan berapa yang dipakai (terjual) (Nainggolan, 2006: 60).

Dalam sistem ini, catatan persediaan diperbarui pada saat pembelian atau penjualan dilakukan. Dengan cara ini, catatan persediaan setiap saat

mencerminkan berapa banyak setiap persediaan barang harus berada di gudang atau di luar toko (Skousen, 2001:365).

Walaupun neraca dan laporan laba rugi dapat segera disusun tanpa melakukan perhitungan fisik atas barang, namun minimal setahun sekali perlu dilakukan pengecekan apakah jumlah barang yang ada digudang sesuai dengan catatan. Hal ini dimaksudkan untuk menguji keakuratan pencatatan. Sistem perpetual ini memberikan suatu pengawasan yang lebih baik atas persediaan, juga informasi atas jumlah persediaan dapat lebih cepat diakses.

Bagian akuntansi mencatat setiap adanya transaksi yang berhubungan dengan persediaan, selain membuat jurnal ia juga mencatat mutasi dalam kartu persediaan masing-masing barang. Kartu persediaan tersebut membantu dalam hal pengawasan, yaitu mutasi persediaan yang berlaku sebagai arsip, sedangkan kartu barang adalah kartu yang ditempelkan pada rak tempat penyimpanan barang-barang.

Jadi dapat dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem perpetual diharuskan untuk menyelenggarakan catatan-catatan secara berkesinambungan yang berisikan catatan tentang persediaan yang dimiliki dan yang telah terjual, dalam pengertian ini ditegaskan bahwa kartu persediaan berguna untuk mengawasi setiap jenis persediaan dengan memperlihatkan kuantitas, harga satuan, dan total harga untuk setiap pembelian, serta penjualan.

3. Metode Penilaian Persediaan

Penilaian persediaan merupakan salah satu bagian dalam masalah akuntansi untuk menentukan harga pokok dari persediaan yang dimiliki secara

wajar. Untuk menetapkan penghasilan yang wajar dengan membebankan biaya yang bersangkutan terhadap pendapatan perusahaan. Penentuan nilai ini sangat erat kaitannya dalam jumlah harta pada saat tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Setiap akhir periode penentuan jumlah persediaan pada neraca maupun daftar laba rugi adalah berdasarkan metode penilaian yang diterapkan sesuai dengan pertimbangan dari manajemen tersebut. Penilaian persediaan terutama bagi perusahaan dagang, erat kaitannya dengan biaya. Pengertian biaya disini mencakup seluruh pengeluaran atau beban yang timbul secara langsung atau tidak langsung untuk mempersiapkan suatu barang agar siap untuk dijual.

Untuk mengadakan penilaian atas persediaan, banyak metode yang dapat digunakan. Dalam beberapa literatur, dikemukakan defenisi yang hampir sama mengenai ini.

Ikatan Akuntansi Indonesia (2007 : 14.4) menyatakan bahwa biaya persediaan kecuali yang disebut dalam paragraf 18, harus dihitung menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO), rata-rata tertimbang (*weight average cost methode*) atau masuk terakhir keluar pertama (MTKP atau LIFO).

Masing-masing metode di atas memiliki karakteristik tertentu, yang membuat satu lebih disenangi dari yang lain, walaupun dalam kondisi normal. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa semua metode sebenarnya memberikan hasil yang sama dalam kondisi norma, namun karena harga terus berfluktuasi maka manajemen dituntut untuk dapat memilih metode mana yang dapat memberikan hasil maksimal.

a. Metode Identifikasi Khusus

Apabila persediaan yang dimiliki relatif mahal dan sedikit jenisnya, memungkinkan untuk menggunakan metode ini. Pada metode ini setiap jenis barang yang ada dalam persediaan diberi identitas (pengenal) khusus tentang harga pokok pesanannya.

Metode ini dapat dikatakan paling tepat dalam hubungannya dengan proses penentuan laba rugi periodik, karena hasil penjualan dibebani dengan harga pokok yang melekat pada barang-barang yang bersangkutan.

Untuk menjelaskan metode ini, misalkan sebuah perusahaan memiliki transaksi sebagai berikut:

01 Jan, Persediaan awal 200 unit (@ Rp. 100,00)

09 Jan, Pembelian 300 unit (@ Rp. 110,00)

10 Jan , Penjualan 400 unit

15 Jan , Pembelian 400 unit (@ Rp. 116,00)

18 Jan , Penjualan 400 unit

24 Jan , Pembelian 100 unit (@ Rp. 126,00)

Dengan demikian total barang yang tersisa siap untuk dijual adalah:

Keterangan	Unit	Harga/ Unit	Total
Persediaan awal (1 Jan)	200	100	20.000
Pembelian (09 Jan)	300	110	33.000
Pembelian (15 Jan)	400	116	46.400
Pembelian (24 Jan)	100	126	<u>12.600</u>
			112.000

Dari perhitungan fisik yang dilakukan pada 31 Jan diketahui kuantitas barang persediaan yang tersisa adalah sebanyak 300 unit. Untuk dapat menerapkan metode ini persediaan harus dikelompokkan berdasarkan harga pokok pembelian dan jenisnya. Misalkan 300 unit persediaan yang tersisa berasal dari:

Pembelian 24 Januari sebanyak 100 unit, @ Rp. 126,00

Pembelian 15 Januari sebanyak 100 unit, @ Rp. 116,00

Pembelian 09 Januari sebanyak 100 unit, @ Rp. 110,00

Dengan demikian harga pokok persediaan akhir tersebut adalah:

$100 \times \text{Rp. } 126,00 = \text{Rp. } 12.600$

$100 \times \text{Rp. } 116,00 = \text{Rp. } 11.600$

$100 \times \text{Rp. } 110,00 = \text{Rp. } 11.000$

300 unit = Rp. 35.200

b. Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (First In First Out)

Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa biaya-biaya persediaan ditetapkan dengan harga pokok yang paling baru. Pendapatan dibebani biaya yang dianggap dapat ditetapkan pada barang-barang yang sebenarnya dijual. Persediaan akhir dilaporkan dengan nilai menurut harga pokok yang paling baru yang sangat dekat dengan nilai berjalan persediaan pada tanggal neraca.

Berdasarkan contoh di atas, jika perusahaan tersebut menerapkan sistem FIFO dalam penilaian persediaannya maka dari total persediaan akhir (300 unit) tersebut terdiri atas:

Pembelian tanggal 24 Januari 100 unit, @ Rp. 126,00

Pembelian tanggal 15 Januari 200 unit, @ Rp. 116,00

Dengan demikian harga pokok persediaan akhir tersebut jika dihitung dengan sistem pencatatan periodik adalah:

$$100 \times \text{Rp. } 126,00 = \text{Rp. } 12.600$$

$$200 \times \text{Rp. } 116,00 = \text{Rp. } 23.200$$

$$300 \text{ unit senilai} = \text{Rp. } 35.800$$

Jika harga pokok persediaan akhir tersebut dihitung dengan sistem pencatatan perpetual dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1
Penilaian Persediaan Metode FIFO secara Perpetual

Tgl	Masuk/Pembelian			Keluar/Penjualan			Saldo		
	Unit	Hrg/Unit (Rp)	Jumlah (Rp)	Unit	Hrg/Unit (Rp)	Jumlah (Rp)	Unit	Hrg/Unit (Rp)	Jumlah (Rp)
Januari 2007	1						200	100	20.000
							200	100	20.000
	9	300	110	33.000			300	110	33.000
	10			200	100	20.000			
				200	110	22.000	100	110	11.000
	15						100	110	11.000
		400	116	46.400			400	116	46.400
	18			100	110	11.000			
				200	116	23.200	200	116	23.200
							200	116	23.200
24	100	126	12.600				100	126	12.600

Sumber: Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting*, edisi 8. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

c. Metode Masuk Terakhir Keluar Pertama (Last In First Out)

Metode ini mengasumsikan bahwa harga pokok barang yang paling terakhir dibeli harus dibebankan pada harga pokok penjualan. Dengan demikian harga pokok persediaan ditetapkan dengan harga pokok barang terbaru.

Berdasarkan contoh sebelumnya jika metode LIFO ini diterapkan, maka nilai persediaan akhir tersebut (300 unit) jika dihitung dengan sistem pencatatan periodik adalah:

$$200 \times \text{Rp. } 100,00 = \text{Rp. } 20.000$$

$$100 \times \text{Rp. } 110,00 = \text{Rp. } 11.000$$

$$300 \text{ unit senilai} = \text{Rp. } 31.000$$

Jika harga pokok persediaan akhir tersebut dihitung dengan sistem pencatatan perpetual adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel II.2
Penilaian Persediaan Metode LIFO secara Perpetual

Tgl	Masuk/Pembelian			Keluar/Penjualan			Saldo		
	Unit	Hrg/Unit (Rp)	Jumlah (Rp)	Unit	Hrg/Unit (Rp)	Jumlah (Rp)	Unit	Hrg/Unit (Rp)	Jumlah (Rp)
Januari 2007	1						200	100	20.000
							200	100	20.000
	9	300	110	33.000			300	110	33.000
	10			300	110	33.000			
				100	100	10.000	100	100	10.000
	15						100	100	10.000
		400	116	46.400			400	116	46.400
	18			300	116	34.800	100	100	10.000
							100	116	11.600
							100	100	10.000
							100	116	11.600
24	100	126	12.600				100	126	12.600

Sumber: Baridwan, Zaki, 2004. *Intermediate Accounting*, edisi 8. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Salah satu keunggulan yang nyata dapat disaksikan pada penerapan metode LIFO adalah bahwa arus biaya LIFO sejalan dengan arus fisik barang persediaan pada perusahaan tertentu. Sebagai contoh, bagi perusahaan dagang penyedia barang material bahan bangunan (pasir atau serti/kerikil), pasir atau serti/kerikil yang terakhir masuk sebagai persediaan merupakan pasir atau serti/kerikil yang pertama akan keluar karena terletak paling atas dari tumpukan, petugas pengambilan tidak akan mulai mengambil persediaan dari bagian bawah.

Argumen lain yang menyebabkan mengapa LIFO menjadi pilihan adalah manfaat pajak. Meskipun harga barang untuk persediaan terus naik,

penerapan LIFO akan menyebabkan perhitungan persediaan akhir menjadi lebih rendah sehingga harga pokok menjadi lebih tinggi yang akhirnya menampilkan laba yang lebih rendah.

Meskipun metode LIFO memiliki banyak keunggulan, namun metode ini juga memiliki berbagai kelemahan khususnya berkurangnya laba. Laba yang rendah memang akan menyebabkan beban pajak yang dikeluarkan menjadi lebih rendah, namun hal ini juga menjadi kekhawatiran pihak manajemen akan pandangan investor yang salah terhadap berkurangnya laba tersebut.

Selain itu, LIFO juga memiliki pengaruh yang mendistorsi terhadap neraca perusahaan. Penilaian persediaan biasanya ketinggalan jaman karena biaya yang paling tua masih ada dalam persediaan. Kurang saji ini menyebabkan posisi modal kerja perusahaan tampak lebih buruk dari kondisi aktualnya (Kieso: 473).

d. Metode Harga Pokok Rata-rata

Sesuai dengan yang tersirat dari namanya, metode biaya rata-rata menghitung pos-pos yang ada dalam persediaan atas dasar biaya rata-rata dari barang yang tersedia dalam satu periode. Ada dua jenis teknik perhitungan nilai persediaan dengan metode rata-rata tertimbang, yakni metode rata-rata tertimbang (pada sistem periodik) dan metode rata-rata bergerak (pada sistem perpetual).

Keterangan	Unit	Harga/Unit	Total
Persediaan awal (1 Jan)	200	100,00	20.000
Pembelian (09 Jan)	300	110,00	33.000
Pembelian (15 Jan)	400	116,00	46.400
Pembelian (24 Jan)	<u>100</u>	126,00	<u>12.600</u>
	1.000		112.000

Berdasarkan data di atas, maka harga pokok rata-rata tertimbangnya adalah:

$$\frac{\text{Rp. 112.000}}{1.000} = \text{Rp. 112,00,-}$$

Dengan demikian harga pokok persediaan akhir tersebut jika dihitung dengan sistem pencatatan periodik adalah:

$$300 \text{ unit} \times \text{Rp. 112,00} = \text{Rp. 33.600,00}$$

Jika metode pencatatan secara perpetual, barang-barang yang dikeluarkan akan dibebani harga pokok pada akhir periode, karena harga pokok rata-rata baru dihitung pada akhir periode, maka akibatnya jurnal untuk mencatat berkurangnya persediaan barang juga dibuat pada akhir periode. Apabila harga pokok dicatat setiap terjadi pengeluaran barang maka diperlukan menghitung harga pokok disetiap kali pembelian barang dagang dilakukan, sehingga dalam satu periode akan terdapat beberapa harga pokok rata-rata barang. Dengan contoh yang sama dengan sebelumnya, kartu barang yang dicatat dengan metode biaya rata-rata bergerak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 11.3
Metode Harga Pokok Rata-rata secara Perpetual

Tgl	Masuk/Pembelian			Keluar/Penjualan			Saldo		
	Unit	Hrg/Unit (Rp)	Jumlah (Rp)	Unit	Hrg/Unit (Rp)	Jumlah (Rp)	Unit	Hrg/Unit (Rp)	Jumlah (Rp)
Januari 2007	1						200	100	20.000
	9	300	110	33.000			500	106	53.000
	10			400	106	42.400	100	106	10.600
	15	400	116	46.400			500	114	57.000
	18			300	114	34.200	200	114	22.800
	24	100	126	12.600			300	118	35.400

Sumber: Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting*, edisi 8. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

e. Metode Laba Kotor

Metode ini digunakan untuk menentukan taksiran nilai persediaan tanpa melakukan perhitungan fisik persediaan atau untuk menguji ketelitian data akuntansi.

Perusahaan memiliki alasan tertentu untuk menggunakan metode ini, antara lain untuk (Dyckman, 2000: 466):

- 1) Untuk menguji kelayakan penilaian persediaan yang ditentukan dengan cara lainnya, seperti perhitungan fisik atau dari catatan persediaan perpetual.
- 2) Untuk mengestimasi persediaan akhir laporan keuangan interim yang disiapkan sepanjang tahun ketika tidak praktis jika dilakukan perhitungan fisik persediaan.
- 3) Untuk mengestimasi nilai persediaan yang musnah karena kecelakaan atau terkena badai.
- 4) Untuk mengembangkan estimasi anggaran dari harga pokok penjualan, margin kotor, dan persediaan yang konsisten dengan anggaran pendapatan penjualan.

f. Metode Harga Eceran

Metode ini digunakan secara luas oleh perusahaan yang menjual barangnya dengan cara eceran. Sebagaimana halnya dengan metode harga kotor, metode ini memungkinkan perhitungan jumlah persediaan tanpa menggunakan waktu yang lama ataupun biaya yang besar untuk melakukan *stock opname* terhadap persediaan secara perpetual yang rinci bagi masing-masing jenis persediaan yang jumlahnya relatif banyak.

Dalam menggunakan metode ini, pencatatan harga barang dilakukan dengan dua jumlah yaitu dengan harga pokok dan harga eceran.

Untuk menentukan persediaan akhir dengan metode ini dilakukan dengan cara mengalikan persentase harga pokok dengan persediaan akhir menurut harga eceran. Sedangkan persentase harga pokok dihitung dengan cara membagi

barang yang tersedia untuk dijual menurut harga pokok barang yang tersedia untuk dijual menurut harga eceran.

g. Menurut Harga Terendah antara Harga Pokok dengan Harga Jual

Perhitungan atas dasar harga pokok terhadap persediaan dianggap memuaskan bila manfaat persediaan itu tidak berkurang sejak saat perolehannya. Jika terbukti manfaat persediaan itu tidak lagi sepadan dengan harga pokoknya, maka hal ini diukur dengan manfaat dari persediaan itu dalam penjualan atau pemakaiannya di dalam kegiatan normal perusahaan. Dalam prakteknya, berkurangnya manfaat persediaan semacam itu sering terjadi yang diakibatkan karena kerusakan fisik, penyusutan, perubahan tingkat harga, barang yang cacat, dan sebab lain yang berpengaruh.

Dalam kegiatan demikian, pada umumnya diselesaikan dengan cara menyajikan persediaan itu berdasarkan harga yang lebih rendah dari harga pokoknya, berarti mengakui adanya suatu kerugian yang berupa selisih antara harga pokok dengan harga pasar dari persediaan yang bersangkutan.

4. Penyajian Persediaan dalam Laporan Keuangan

Pada akhir tahun buku, perusahaan akan menyusun laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan atau laporan laba ditahan, dan laporan arus kas.

Dalam laporan keuangan persediaan memiliki kedudukan ganda yaitu sebagai jumlah yang dimasukkan dalam perhitungan neraca dan sebagai jumlah yang dinyatakan dalam perhitungan laba rugi.

Dalam neraca, persediaan termasuk salah satu perkiraan harta lancar, sedangkan pada laporan laba rugi persediaan ditampilkan sebagai bagian unsur penentu harga pokok pembelian atas persediaan.

Ada beberapa pos khusus yang harus diperhatikan yang mempengaruhi jumlah dan nilai persediaan dalam laporan keuangan yaitu:

a. Barang dalam Perjalanan

Barang yang pada tanggal neraca masih dalam perjalanan menimbulkan masalah, apakah merupakan milik penjual atau telah berpindah hak menjadi milik pembeli. Untuk itu harus diketahui syarat penyerahan barang yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Weygand, Kieso dan Kimmel dalam *Accounting Principles* (2002: 226) mengemukakan ada dua syarat penyerahan barang, yaitu:

- 1) *FOB (free on board) Shipping Point: Ownership of the goods passes to the buyer when the public carrier accepts the goods from the seller*
- 2) *FOB Destination: Legal title of the goods remains with the seller until the goods reach the buyer.*

Jika barang yang dikirim atas dasar *FOB Shipping Point* maka hak kepemilikan barang berpindah ke pembeli ketika penjual menyerahkan barang kepada pihak/perusahaan pengangkut yang bertindak sebagai agen bagi pembeli. Jika syarat perpindahan kepemilikannya *FOB Destination* maka hak kepemilikan baru akan berpindah kepada pembeli jika barang yang dibeli telah sampai kepada pihak pembeli.

Karena sebagian besar pengiriman barang dari pemasok mengandung beragam jenis persediaan, maka tidak praktis untuk mengidentifikasi biaya

spesifik setiap jenis persediaan yang dibeli. Oleh karena itu maka biaya transportasi atas pembelian barang dikumpulkan dalam rekening *Transportasi Masuk* yang akan dimasukkan dalam laporan rugi/ laba sebagai biaya pokok penjualan (Simamora, 2000: 145).

Penekanan utama dari dua syarat tersebut adalah bahwa barang yang hak legalnya telah berpindah kepada pembeli harus dicatat sebagai pembelian pada tahun berjalan. Ketika perusahaan tidak mencatat persediaan barang dalam perjalanan yang syarat penyerahannya *FOB Shipping Point*, maka pengabaian seperti itu akan mengakibatkan persediaan dan hutang usaha ditetapkan terlalu rendah dalam neraca, serta pembelian dan persediaan akhir dicatat terlalu rendah dalam laporan laba rugi.

b. Barang-barang Konsinyasi (Consignment Goods)

Konsinyasi adalah pengaturan pemasaran dimana *consignor* (pemilik barang) mengirimkan barang dagang ke perusahaan lain, dikenal sebagai *consignee*, yang bertindak hanya sebagai penjual (Dickman, 2000: 379).

Dalam cara penjualan titipan atau penjualan konsinyasi ini, barang yang dititipkan untuk dijual hak pemilikannya masih tetap pada yang menitipkan sampai saat barang tersebut dijual. Pihak yang menerima titipan (*consignee*) tidak mempunyai hak atas barang tersebut sehingga tidak mencatat barang tersebut sebagai persediaannya.

Adapun adanya barang konsinyasi yang belum habis terjual pada akhir periode, bagi pihak yang menerima titipan (*consignee*) tidak perlu mengadakan penyesuaian atas persediaan barang tersebut karena barang tersebut memang bukan miliknya (Arifin, 1999: 170).

Skousen (2001: 363) menyatakan adalah sangat penting bahwa barang konsinyasi tidak dimasukkan ke dalam persediaan dari perusahaan yang memegang barang untuk dijual walaupun fisik ada di perusahaan tersebut.

Perbedaan mendasar persediaan barang dagang konsinyasi dan reguler adalah terletak pada hak milik atas persediaan tersebut. Selain itu, perbedaan lainnya adalah dalam hal biaya operasi. Semua biaya operasi yang berkenaan dengan penjualan barang konsinyasi akan ditanggung oleh pemilik barang (*consignor*) (Arifin, 1999: 147).

c. Penjualan Angsuran (Installment Sales)

Penjualan barang seringkali dilakukan berdasarkan pembayaran tangguhan, dimana pihak penjual menerima pembayaran pendahuluan dan sisanya dalam bentuk sedecetan pembayaran sesuai dengan persetujuan. Suharto (2001: 61) menjelaskan secara singkat bahwa penjualan angsuran adalah penjualan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap selama batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Karena resiko kerugian dari piutang tak tertagih lebih besar dalam penjualan cicilan dibandingkan dengan transaksi penjualan lain, maka penjual biasanya menahan hak legal atas barang sampai seluruh pembayaran dilakukan. Masalahnya apakah persediaan harus dipandang telah terjual meskipun hak legal belum berpindah ke pembeli? Jawabanya adalah barang harus dihapuskan dari persediaan penjual jika persentase piutang tak tertagih dapat diestimasi secara memadai (E. Kieso: 2002).

Allan R. Drebin (1999: 134) menyatakan jika terjadi ketidakmampuan membayar atas kontrak penjualan cicilan maka pemilikan kembali barang yang telah dijual membutuhkan harus dicatat dalam jurnal yang melaporkan barang

dagangan yang diperolehnya kembali, yang membatalkan piutang usaha cicilan beserta saldo laba kotor yang ditangguhkan, dan yang mencatat keuntungan atau kerugian atas pemilikan-kembali barang tersebut.

5. Pengendalian Intern terhadap Persediaan

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya peraturan manajemen.

Mengabaikan bagaimana atau dimana permohonan pembelian diawali, memilih seorang pemasok juga mengatur cara dan pengiriman adalah fungsi dari departemen pembelian (Bodnar, 2003: 429).

Pengendalian atas persediaan dapat dilakukan dengan cara:

a. Pengawasan Fisik

Pengawasan fisik merupakan pengawasan yang dilakukan manajemen atas fisik persediaan itu sendiri. Tujuan utama dari pengawasan fisik adalah untuk menghindari pencurian dan kecurangan atau penyelewengan. Pengawasan fisik dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Memiliki gudang yang cukup baik
- 2) Melakukan perhitungan fisik secara tiba-tiba walaupun pencatatan dilakukan dengan sistem perpetual
- 3) Mengasuransikan persediaan

b. Pengawasan Akuntansi

Pengawasan akuntansi persediaan meliputi pembuatan kartu persediaan, catatan atau buku tambahan untuk mencatat jumlah dan harga barang

yang dibeli (diterima) dan dijual (dikeluarkan). Jumlah barang yang ada pada catatan harus cocok dengan yang ada di gudang.

Pengawasan akuntansi terhadap persediaan juga harus didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya pemisahan tugas yang jelas antara orang yang bertanggung jawab terhadap gudang dan orang yang mencatat kartu persediaan, sehingga mereka saling mengawasi secara tidak langsung;
- 2) Pihak yang berwenang mengeluarkan barang-barang dari gudang harus ditetapkan terlebih dahulu;
- 3) Pada setiap surat permintaan pengeluaran barang harus ada persetujuan dari yang berwenang;
- 4) Harus selalu diadakan perhitungan langsung terhadap penilaian fisik agar dapat dibandingkan dengan jumlah yang ada pada kartu persediaan dan catatan.

E. Akuntansi dalam Perspektif Islam

Istilah harta, atau *al-mal* dalam al-Qur'an maupun Sunnah tidak dibatasi dalam ruang lingkup makna tertentu, sehingga pengertian *al-Mal* sangat luas dan selalu berkembang. Kriteria harta menurut para ahli fiqh terdiri atas: pertama, memiliki unsur nilai ekonomis. Kedua, unsur manfaat atau jasa yang diperoleh dari suatu barang (Muhammad: 2005).

Mengenai pembelanjaan harta, Islam mengajarkan agar membelanjakan hartanya mula-mula untuk mencukupkan kebutuhan dirinya sendiri, lalu untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya, barulah memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan ini, Islam mengharamkan

bermegah-megah dan berlebih-lebihan (*Israf dan mubazir*). Karena sifat ini cenderung kepada penumpukan harta yang membekukan fungsi ekonomis dari harta tersebut.

Untuk itulah pada satu takaran tertentu harta dikenai wajib zakat. Zakat merupakan implementasi pemenuhan hak masyarakat dan upaya memberdayakan harta pada fungsi ekonomisnya.

Ringkasnya, aturan dalam memperoleh harta dan membelanjakan harta, didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Prinsip Sirkulasi dan Perputaran

Artinya harta memiliki fungsi ekonomis yang harus senantiasa diberdayakan agar aktifitas ekonomi berjalan sehat. Maka harta harus berputar dan bergerak di kalangan masyarakat baik dalam bentuk konsumsi atau investasi. sarana yang diterapkan oleh syari'at untuk merealisasikan prinsip ini adalah dengan larangan menumpuk harta, monopoli terutama pada kebutuhan pokok, larangan riba, berjudi, menipu.

2) Prinsip Jauhi Konflik

Artinya harta jangan sampai menjadi konflik antar sesama manusia. Untuk itu diperintahkan aturan dokumentasi, pencatatan/akuntansi, al-isyhad/ saksi, jaminan (*rahn/ gadai*).

3) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dimaksudkan untuk meminimalisasi kesenjangan sosial yang ada akibat perbedaan kepemilikan harta secara individu. Terdapat dua metode untuk merealisasikan keadilan dalam harta yaitu

perintah untuk zakat infak shadaqah, dan larangan terhadap penghamburan (Israf/mubazir).

Dalam kaitannya dengan persediaan, ada kewajiban yang harus dilakukan pemilik usaha dalam memperlakukan barang dagangannya, yakni mengeluarkan sejumlah tertentu dari persediaan yang kita simpan. Namun hal ini diharuskan pada saat barang dagangan tersebut telah sampai pada syarat yang menyebabkan diwajibkannya untuk dikeluarkan zakatnya. Syarat tersebut antara lain:

- 1) Bukan termasuk harta yang sudah masuk kategori zakat yang lain.

Kalau yang dimiliki adalah kambing yang didagangkan, itu dimasukkan ke zakat kambing. Kalau yang didagangkan adalah emas dan perak, itu dimasukkan pada zakat emas dan perak.

- 2) Telah mencapai nishob (ukuran minimal dikenai zakat).

Nishob zakat barang dagangan disamakan dengan emas (bukan dengan perak). Alasan kenapa disetarakan dengan emas. Nishob emas, ada yang mengatakan 70 gr, ada juga ulama yang berpendapat 85 gr. Kalau kita menggunakan nishob terendah, dengan harga emas Rp. 454.500/gr x 70gr = Rp 31.815.000. Artinya jika nilai barang dagangan di atas kira-kira 30 juta barulah dikenai zakat.

- 3) Telah mencapai haul (masa satu tahun hijriyah, bukan masehi).

Artinya di sini, barang dagangan tersebut berada di atas nishob dan telah bertahan selama satu tahun (haul). Haul yang dianggap di sini adalah seluruh haul. Artinya jika nilai barang dagangan di tengah-tengah haul kurang dari nishob, maka tidak dikenai zakat. Demikian

pendapat mayoritas (jumhur) ulama. Jika modal mulai usaha sudah berada di atas nishob sejak awal usaha, maka haul sudah dihitung sejak awal usaha. Jika modal tidak mencapai nishob sejak awal usaha, maka haul baru dihitung sejak nilai barang dagangannya di atas nishob.

Adapun dalam transaksi pembelian di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa transaksi harus dicatat, khususnya pembelian secara hutang. Sebagaimana Firman Allah Surat Al-Baqoroh ayat: 282 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدَقُّ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانْقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki

(di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Mega Department Store didirikan pada tanggal 30 April 2001, dikukuhkan dengan Akte Pendirian no. 563 yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono SH, Notaris di Batam. Berdasarkan S.K Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 28 Oktober 2002 no.C-1533.HT.03.01-Th.2002.

Diawal berdirinya, sebelum membuka cabang yang kemudian pindah secara keseluruhan ke Mall Pekanbaru, PT. Mega Dept. Store berlokasi di Jl. Jendral Sudirman tepat di Depan Pasar Buah Pekanbaru. Kemudian pada tahun 2003 Mega Dept Store membuka cabang di Mall Pekanbaru yang kemudian melakukan penutupan tempat usaha yang di depan Pasar Buah Pekanbaru pada tahun 2005.

Bidang usaha utama perusahaan hingga saat ini adalah perdagangan, khususnya produk pakaian, kosmetik dan peralatan rumah tangga yang berkantor dan menjalankan usaha utamanya di Mall Pekanbaru lantai 3 (tiga).

B. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi PT. Mega Dept. Store dapat dilihat pada Gambar III.1, adapun tugas tugas dan wewenang untuk setiap bagiannya adalah sebagai berikut:

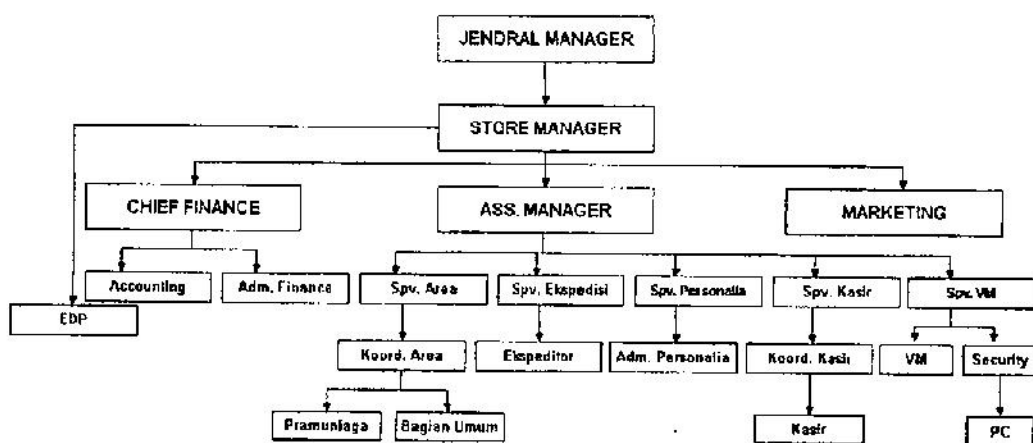
1. Jendral Manager

Jendral Manager merupakan orang yang mendapat kepercayaan khusus dari pemegang saham untuk menjalankan usaha menurut

kesepakatan yang disepakati. Adapun tugas dan wewenang dari Jendral Manager adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi jalannya perusahaan agar tetap sesuai dengan kebijakan anggaran dasar perusahaan;
- b. Mewakili perusahaan secara intern maupun ekstern;
- c. Mengangkat dan memberhentikan karyawan;
- d. Mempertanggungjawabkan hasil usaha dan kegiatan perusahaan kepada pemegang saham.

Gambar III.1
Struktur Organisasi PT. Mega Department Store



Sumber: PT. Mega Dept. Store

2. Store Manager

Store Manajer merupakan orang yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang berkaitan langsung dengan usaha utama perusahaan yaitu penjualan dan pembelian di toko. Adapun tugas dan wewenangnya lainnya yaitu:

- a. Bertanggungjawab melaksanakan kegiatan operasional perdagangan perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku diperusahaan;

- b. Melaporkan hasil usaha perusahaan secara periodik atau saat yang ditentukan kepada Jendral Manager;
- c. Memberikan saran kepada Jendral Manager sehubungan dengan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan karyawan yang bertugas di took.

3. Assistant Store Manager

Assistant Store Manager merupakan pembantu utama Store Manager dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di toko. Mengkoordinir bawahan di sub-sub bagian yang telah ditentukan agar bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan perusahaan. Adapun bagian-bagian yang harus dikoordinir adalah sebagai berikut:

a. Supervisor Area dan Koordinator Area

Supervisor Area merupakan bagian yang menentukan dan mengatur penempatan barang dagang berdasarkan merek dagang (*trademark*) ataupun berdasarkan jenis produk atau dikenal sebagai Pembina tata letak. Supervisor Area dibantu oleh seorang *Koordinator Area* dalam hal pengawasan penempatan barang dan juga mengawasi dan membawahi sub bagian berikut:

- 1) *Pramuniaga*, berkewajiban melayani konsumen sekaligus menjaga barang dagang serta melaporkan arus barang yang terjual dan mengisi kartu stok barang yang ada di outlet/ stan;
- 2) *Bagian Umum*, berkewajiban menjaga kebersihan toko dan bagian-bagian yang menjadi bagian toko (sebagai bagian penjaga kebersihan).

b. Supervisor Ekspedisi dan Ekspeditor

Tugas dan tanggungjawab Supervisor Ekspedisi adalah mengawasi proses pengangkutan barang dagang masuk dan keluar. Supervisor Ekspedisi mengepalai *Ekspeditor* (supir), yang berstatus karyawan tetap maupun sementara (sewaan).

c. Supervisor Personalia dan Administrasi Personalia

Merupakan bagian yang bertanggungjawab dalam proses perekrutan karyawan dan penilai serta penampung aspirasi karyawan. Sedangkan dalam hal penataan arsip yang berkaitan dengan karyawan seorang Supervisor Personalia dibantu oleh seorang Administrasi Personalia.

d. Supervisor Kasir, dan Kasir

Supervisor Kasir berkewajiban mengawasi kerja kasir serta melakukan pembayaran gaji karyawan. Supervisor kasir juga bertugas mencatat seluruh pengeluaran uang yang dilakukan untuk pembayaran biaya operasional perusahaan dan pengeluaran khusus lain menurut aturan yang berlaku di perusahaan. Sedangkan *Kasir* bertugas menerima pembayaran atas penjualan barang dagang dan membuat pencatatan atas transaksi penjualan harian. Seluruh laporan yang dibuat diserahkan kepada Assistant Store Manager.

e. Supervisor Visual Merchandising, Visual Merchandising dan Security

Supervisor Visual Merchandising merupakan bagian yang mengawasi seluruh kegiatan perdagangan, tugas utamanya adalah memastikan perdagangan berjalan dengan lancar dengan memantau

seluruh karyawan yang bertugas dibagian penjualan. Supervisor Visual Merchandising bertugas mengatur jadwal para pramuniaga dan security. Sedangkan Security merupakan bagian yang berkaitan dengan keamanan perusahaan, baik asset maupun yang berkaitan dengan ketidaknyamanan konsumen saat berbelanja karena adanya tindakan yang tidak lazim dari maupun oleh konsumen itu sendiri. Supervisor juga berkewajiban mengatur jadwal kerja karyawan (Security) dan sekaligus turut menangani tindakan kriminal yang terjadi di lingkungan perusahaan.

4. Chief Finance

Adapun tugas dan kewajiban Chief Finance adalah sebagai berikut:

- Menyusun dan mengkoordinir program kerja dibidang keuangan;
- Mengkoordinir tata pembayaran gaji dan jaminan sosial karyawan;
- Bertanggung jawab atas semua pencatatan data keuangan perusahaan;

Chief Finance membawahi dua sub bagian, yaitu

a. Administrator Finance

Merupakan bagian yang bertanggung jawab dalam hal pengarsipan data-data keuangan perusahaan, melaksanakan segala urusan yang berkaitan dengan bank termasuk pencairan dana dan penyetoran kas ke bank rekanan perusahaan.

b. Accounting

Membuat laporan keuangan serta melaporkannya secara periodikal maupun ketika diminta oleh pimpinan. Bagian ini juga melakukan

pengarsipan bukti transaksi yang berkenaan dengan perubahan asset dan kewajiban perusahaan.

5. Marketing

Bagian marketing bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pemasaran sekaligus memantau dampak kebijakan tersebut.

6. Electronic Data Processing (EDP)

Adapun bagian EDP memiliki tugas sebagai berikut:

- Mengumpulkan data penjualan dari meja kasir setiap hari dan mengolahnya menjadi laporan penjualan;
- Membuat laporan penjualan harian, mingguan dan bulanan;
- Membuat laporan penjualan harian, mingguan dan bulanan barang konsinyasi untuk perusahaan dan seluruh perusahaan rekanan dalam hal konsinyasi;
- Melakukan pengawasan atas jaringan lokal perusahaan, terutama hubungan komputer kasir dengan komputer utama perusahaan.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan pembahasan hasil penelitian yang penulis lakukan di PT. Mega Department Store tentang perlakuan akuntansi persediaan.

A. Pengaruh Biaya Angkut Pembelian Barang Dagang terhadap Harga & Pokok Persediaan Barang Dagang

Harga pokok persediaan merupakan seluruh pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan persediaan yang siap untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Dalam kaitannya dengan pengorbanan atau pengeluaran untuk perolehan barang dagang maka biaya angkut pembelian merupakan salah satu dari biaya pembelian.

PSAK No. 14.2 tahun 2007 menyatakan bahwa biaya persediaan harus meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai (*present location and condition*). Dimana pada paragraf selanjutnya (paragraf 07) dalam PSAK No.14 dijelaskan lebih lanjut bahwa biaya pembelian meliputi harga pembelian, bea masuk, dan pajak lainnya (kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh perusahaan kepada kantor pajak), *biaya pengangkutan*, penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa.

Selama periode tahun 2007 pada pernyataan laba rugi dapat dilihat adanya Biaya Transportasi sebesar Rp.50.763.650 sebagai biaya operasional

perusahaan. Bagi perusahaan pembebanan langsung Biaya Transportasi pada pembelian barang dagang akan menyebabkan perusahaan sulit untuk menentukan harga jual barang dagangannya, karena harga jual barang dagangan sewaktu-waktu akan dirubah sebagai bentuk strategi penguasaan pasar.

Perusahaan memasukkan semua biaya yang berkenaan dengan transportasi ke akun biaya transportasi, tidak hanya biaya angkut pembelian saja, tetapi biaya yang dikeluarkan untuk keperluan kegiatan lain seperti penyewaan kendaraan untuk rekreasi atau kunjungan lain, bahkan semua biaya yang dikeluarkan selama dalam perjalanan (pengeluaran untuk supir dan pembelian bahan bakar serta konsumsi) juga dicatat sebagai biaya transportasi.

Saat melakukan penelitian, penulis mengambil beberapa bukti pengeluaran perusahaan yang berkaitan dengan biaya pengangkutan pembelian yaitu kwitansi No.0056 yang menunjukkan adanya biaya pengangkutan sebesar Rp.1.050.000 yang dikeluarkan perusahaan untuk biaya penyewaan kendaraan yang digunakan untuk melakukan pembelian barang dagang. Sedangkan kwitansi No.0078 merupakan biaya untuk angkut dan bongkar muat barang atas pembelian pada bulan Agustus dan September tahun 2007 sebesar Rp. 3.450.000. Kedua transaksi ini oleh perusahaan dicatat sebagai penambah akun biaya transportasi dan mengkredit akun kas. Jurnal yang dibuat perusahaan adalah sebagai berikut:

Kwitansi No.0056, 15 Pebruari 2007

<i>Biaya Transportasi</i>	<i>Rp. 1.050.000</i>
<i>Kas</i>	<i>Rp. 1.050.000</i>

Kwitansi No.0078, 15 September 2007

<i>Biaya Transportasi</i>	<i>Rp. 3.450.000</i>
<i>Kas</i>	<i>Rp. 3.450.000</i>

Kesalahan perlakuan kedua transaksi tersebut menyebabkan harga pokok persediaan barang dagang menjadi lebih rendah sebesar Rp.4.500.000 dari yang seharusnya. Seharusnya perusahaan memasukkan biaya transportasi pembelian barang dagang tersebut ke dalam akun pembelian dengan membuat jurnal sebagai berikut:

Kwitansi No.0056, 15 Pebruari 2007

<i>Pembelian</i>	<i>Rp. 1.050.000</i>
<i>Kas</i>	<i>Rp. 1.050.000</i>

Kwitansi No.0078, 15 September 2007

<i>Pembelian</i>	<i>Rp. 3.450.000</i>
<i>Kas</i>	<i>Rp. 3.450.000</i>

Atas kesalahan pencatatan kedua transaksi tersebut maka perusahaan harus membuat jurnal koreksi agar laporan keuangan dapat disajikan secara wajar. Jurnal koreksi yang dibuat sebelum tutup buku adalah dengan mendebit akun pembelian dan mengkredit akun biaya transportasi sebagai berikut:

<i>Pembelian</i>	<i>Rp. 4.500.000</i>
<i>Biaya Transportasi</i>	<i>Rp. 4.500.000</i>

Apabila koreksi dilakukan setelah tutup buku maka jurnal koreksi yang dibuat adalah dengan mendebit Persediaan Barang Dagang dan mengkredit Laba Ditahan sebagai berikut:

<i>Persediaan Barang Dagang</i>	<i>Rp. 4.500.000</i>
<i>Laba Ditahan</i>	<i>Rp. 4.500.000</i>

Dengan koreksi tersebut berarti perusahaan telah menambah jumlah persediaan barang dagang dan laba ditahan sebesar Rp. 4.500.000. Dengan demikian laporan keuangan PT. Mega Department Store telah menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

B. Pengaruh Pencatatan Potongan Pembelian terhadap Harga & Pokok Persediaan Barang Dagang

Perusahaan mencatat pembelian dan hutang usaha dengan *metode bersih*, hal ini tidak ada masalah ketika transaksi pembelian dilakukan secara tunai karena perusahaan mencatat nilai pembelian setelah dikurangi potongan pembelian (*purchase discount*). Akan tetapi ketika potongan diperoleh saat pembayaran hutang, perusahaan mencatat potongan tersebut sebagai pendapatan. Hal ini dapat dilihat dalam proses pembayaran hutang dagang pada PT. Tritunggal Bangun SJH. PT. Tritunggal telah menyatakan bahwa pembayaran hutang dibawah 10 hari setelah tanggal transaksi akan memperoleh potongan 10%, karena pada tanggal 5 Agustus 2007 perusahaan telah mencatat pembelian tidak tunai senilai Rp. 5.318.000,00 (tidak ada potongan) maka pada saat pelunasannya PT. Mega Dept. Store mengasumsikan bahwa potongan yang diperolehnya pada saat pelunasan hutang merupakan pendapatan lain-lain, yaitu pendapatan atas diskon. Atas kedua transaksi tersebut jurnal yang dibuat oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 5 Agustus 2007, saat pembelian dilakukan.

<i>Pembelian</i>	<i>Rp. 5.318.000</i>
<i>Hutang dagang</i>	<i>Rp. 5.318.000</i>

Pada tanggal 8 Agustus 2007, saat pelunasan hutang atas transaksi tanggal 5 Agustus.

<i>Hutang dagang</i>	<i>Rp. 5.318.000</i>
<i>Kas</i>	<i>Rp. 4.786.200</i>
<i>Pendapatan atas Diskon</i>	<i>Rp. 531.800</i>

Seharusnya transaksi tanggal 8 Agustus 2007 tersebut dicatat sebagai berikut:

<i>Hutang dagang</i>	<i>Rp. 5.318.000</i>
<i>Kas</i>	<i>Rp. 4.786.200</i>
<i>Pembelian (Diskon)</i>	<i>Rp. 531.800</i>

Dengan demikian, karena potongan pembelian tidak diperlakukan sebagai pengurang biaya perolehan persediaan, maka harga pokok persediaan yang telah ditetapkan PT. Mega Dept. Store menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Agar laporan keuangan yang dibuat disajikan secara wajar maka perlu dilakukan koreksi atas kesalahan perlakuan terhadap potongan pembelian ini dengan membuat jurnal koreksi sebagai berikut:

<i>Pendapatan atas Diskon</i>	<i>Rp. 531.800</i>
<i>Pembelian (Diskon)</i>	<i>Rp. 531.800</i>

Dengan membuat jurnal koreksi tersebut, maka akun pembelian telah berkurang sebesar Rp. 351.000. demikian juga halnya dengan akun Pendapatan atas Diskon. Sedangkan untuk menghilangkan seluruh akun pendapatan atas diskon sebesar Rp. 15.670.500 pada laporan laba rugi maka jurnal koreksi yang harus dibuat adalah sebagai berikut:

<i>Pendapatan atas Diskon</i>	<i>Rp. 15.670.500</i>
<i>Pembelian</i>	<i>Rp. 15.670.500</i>

Jurnal ini akan menghapus total akun Pendapatan atas Diskon dan menaikkan nilai akun Pembelian sebesar Rp. 15.670.500.

C. Pengaruh Pencatatan Persediaan Barang Konsinyasi terhadap Harga & Pokok Persediaan Barang Dagang

Konsinyasi adalah pengaturan pemasaran dimana *consignor* (pemilik barang) mengirimkan barang dagang ke perusahaan lain, dikenal sebagai *consignee*, yang bertindak hanya sebagai penjual. Adapun perbedaan mendasar persediaan barang dagang konsinyasi dan reguler adalah terletak pada hak milik atas persediaan tersebut.

PT. Mega Department Store melakukan kesalahan dalam memperlakukan persediaan barang konsinyasi ini. Perusahaan memasukkan persediaan barang konsinyasi ke akun persediaan barang dagang yang benar-benar milik perusahaan. Seharusnya perusahaan tidak memasukkannya ke akun persediaan perusahaan. Berdasarkan laporan fisik persediaan barang dagang PT. Mega Department Store diketahui adanya sisa persediaan konsinyasi sebesar Rp. 468.851.870. Perlakuan ini menyebabkan laporan keuangan yang dibuat perusahaan tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

Agar laporan keuangan ini menunjukkan keadaan yang sebenarnya maka koreksi mutlak diperlukan. Semua hal yang berkaitan dengan barang konsinyasi harus dikeluarkan dari laporan keuangan perusahaan. Untuk itu perusahaan harus membuat jurnal koreksi sebagai berikut:

<i>Laba Ditahan</i>	<i>Rp. 468.851.870</i>
<i>Persediaan Barang Dagang</i>	<i>Rp. 468.851.870</i>

Dengan koreksi tersebut, maka akun persediaan barang dagang akan berkurang sebesar Rp. 468.851.870 sehingga menunjukkan keadaan sebenarnya dari perusahaan.

D. Penyajian Persediaan pada Laporan Keuangan

Persediaan dilaporkan dalam neraca pada laporan keuangan. Di dalam neraca, persediaan barang dagang dicantumkan sebagai aset, letaknya sesudah akun piutang. Selain itu persediaan juga dicantumkan pada laporan laba rugi, dalam kelompok penentu harga pokok penjualan. Adapun total persediaan yang dilaporkan adalah persediaan akhir berdasarkan perhitungan fisik persediaan. Sedangkan perhitungan fisik persediaan harus mengungkapkan nilai dari persediaan yang kepemilikannya adalah milik perusahaan.

Dalam hal penyajian akun persediaan pada laporan laba rugi, seharusnya perusahaan mencantumkan potongan pembelian persediaan sebagai pengurang pembelian dalam penentuan harga pokok penjualan. Dalam hal ini potongan atas pembayaran hutang dagang pun harus dimasukkan dalam akun potongan pembelian dan bukan sebagai pendapatan. Untuk itu perusahaan harus konsisten dalam menerapkan sistem pencatatan pembelian tunai maupun hutang yang dipilihnya.

Pada laporan keuangan PT. Mega Department Store, biaya pengangkutan pembelian barang dagang diletakkan pada kelompok biaya operasional, padahal seharusnya biaya angkut pembelian barang dagang harus diletakkan pada kelompok harga pokok penjualan sebagai penambah harga perolehan barang dagang.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

BAB V PENUTUP

Berdasarkan pembahasan permasalahan yang ditemui penulis pada perlakuan akuntansi persediaan oleh PT. Mega Department Store pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi persediaan oleh PT. Mega Dept. Store tersebut.

A. Kesimpulan

1. Dalam mencatat transaksi pembelian, perusahaan tidak konsisten dalam menentukan sistem pencatatan diskon pembelian. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak mencatat diskon sebagai pengurang nilai perolehan persediaan.
2. Biaya pengangkutan pembelian oleh perusahaan dicatat satu akun dengan biaya pengangkutan lainnya. Hal ini menyebabkan biaya angkut pembelian barang dagang tersebut tidak dihitung sebagai penambah nilai perolehan persediaan.
3. Total akun persediaan akhir yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan hasil penghitungan fisik persediaan dimana pada laporan fisik tersebut terdapat persediaan yang bukan milik perusahaan. Hal ini menyebabkan nilai persediaan dicatat lebih tinggi dari yang seharusnya, sehingga harga pokok penjualan yang disajikan dalam laporan laba rugi menjadi lebih rendah dari yang seharusnya.

B. Saran

1. Dalam mencatat potongan/ diskon atas pembelian persediaan sebaiknya perusahaan konsisten dalam menggunakan sistem pencatatan yang akan digunakan. Perusahaan harus memilih antara sistem pencatatan bersih dan kotor. Hal ini adalah suatu keharusan agar diskon yang diperoleh dalam transaksi pembelian barang dagang dapat dihitung sebagai pengurang biaya perolehan barang dagang.
2. Sebaiknya biaya pengangkutan pembelian dicatat terpisah dari biaya pengangkutan/ transportasi yang bukan untuk pembelian barang dagang. Hal ini dimaksudkan agar penempatan biaya transportasi tersebut sesuai dengan posisinya masing-masing yaitu biaya pengangkutan pembelian barang dagang sebagai penambah nilai perolehan persediaan, sedangkan biaya pengangkutan lainnya diposkan dalam kelompok biaya operasional.
3. Sebaiknya perusahaan melakukan pemisahan tersendiri untuk pencatatan penghitungan fisik persediaan barang konsinyasi, hal ini disarankan agar akun persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan nilai persediaan yang kepemilikannya adalah milik perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. 1999. *Pokok-Pokok Akuntansi Lanjutan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting*, edisi 8. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Bodnar, George H, William S. Hopwood. 2003. *Siste Informasi Akuntansi*, edisi VIII. _____: PT Indeks, Kelompok Gramedia.
- Delaney, Patrick R, et all. 2003. *GAAP 2004, Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles*. Canada: John Wiley & Sons, Inc.
- Drebin, Allan R. 1999. *Advanced Accounting (Akuntansi Keuangan Lanjutan, Edisi Kelima*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Dyckman. Thomas R, Roland E. Dukes, Charles J. Dvavis. 2000. *Akuntansi Intermediate*, jld. 1, terj. Munir Ali. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Indonesia, Per 1 September 2007*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrajit, Richardus Eko dan Richardus Djokopranoto. 2003. *Manajemen Persediaan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Jusuf, Al Haryono. 2003. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: Bagian Penerbit STIE YKPN.
- Kieso, E. Donald dkk. 2002. *Akuntansi Intermediate*, jld. 1, terj. Emil Salim. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi edisi ke-3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nainggolan, Pahala. 2006. *Cara Mudah Memahami Akuntansi*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Niswonger et all. 1999. *Prinsip-Prinsip Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sadeli, Lili M. 2002. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Simamora, Henry. 2000. *Akuntansi, Basis Pengambilan Keputusan Bisnis*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

- Skousen, dkk. 2001. *Akuntansi Keuangan: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Soepardi, Eddy Mulyadi. 2006. *Memahami Akuntansi Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suharto, dkk. 2001. *Paket Keahlian Akuntansi..* Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Warren, Carl S, James M Reeve. Philip E Fess. 2005. *Pengantar Akuntansi, edisi 21, buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Weygand, et all. 2002. *Accounting Principles*. Canada: John Wiley & Sons, Inc.
- Whittington, O. Ray dan Patrick R, Delaney. *CPA, Examination Review 2003, Financial Accounting and Reporting Bussines Enterprises*. Canada: John Wiley & Sons, Inc.